

Nama : Diah Maya Mustika

NPM : 2217011063

Kelas : D

Tugas Analisis Jurnal

Jurnal ini membahas hubungan antara hukum dan etika dalam konteks politik hukum di Indonesia, dengan menekankan peran Pancasila sebagai sumber nilai dan etika. Tujuan utama negara Indonesia, yang dijabarkan dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV, menjadi dasar untuk merumuskan politik hukum yang bertujuan mencapai kesejahteraan bersama. Politik hukum didefinisikan sebagai kebijakan dasar yang mengatur arah, bentuk, dan isi dari hukum yang akan dibentuk. Ini mencakup kompromi atau dominasi kepentingan politik dalam proses legislasi, yang melibatkan para ahli hukum sebagai pemberi masukan, sementara keputusan politik tetap dominan dalam menentukan produk hukum.

Etika dalam konteks ini dikaitkan dengan cabang filsafat yang membahas perilaku manusia, terutama terkait bagaimana hukum dibentuk untuk mengatur perilaku masyarakat berdasarkan prinsip moralitas. Moralitas di sini mengacu pada ajaran yang menilai baik atau buruknya suatu perilaku, sedangkan etika lebih bersifat filosofis dan kritis terhadap prinsip moral. Etika menjadi dasar refleksi kritis atas nilai-nilai moral yang berkembang di masyarakat, serta berkembang dari doktrin agama menjadi pedoman perilaku konkret dalam bentuk kode etik dan peradilan etik.

Politik hukum di Indonesia mengalami perkembangan yang terstruktur, dimulai dari TAP MPRS No. 2 tahun 1960 dan berlanjut hingga terbentuknya Prolegnas yang disusun BPHN untuk merencanakan pembangunan hukum nasional secara terkoordinasi. Dalam perkembangan ini, politik hukum terus diselaraskan dengan konstitusi dan nilai-nilai Pancasila. Hubungan antara hukum dan etika dijelaskan melalui tiga dimensi: dimensi substansi dan wadah, dimensi luas cakupan, serta alasan manusia untuk mematuhi atau melanggar aturan. Secara keseluruhan, jurnal ini menyampaikan bahwa etika menjadi pedoman preventif yang mendahului hukum, membantu mencegah perilaku menyimpang sebelum masuk ke ranah hukum.

Penutup jurnal menegaskan bahwa politik hukum adalah proses memilih nilai-nilai masyarakat yang relevan dan kemudian diselaraskan dengan konstitusi, sehingga dihasilkan produk hukum yang mencerminkan nilai-nilai bersama bangsa Indonesia.